

DIMENSI-DIMENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI INSTITUSI KEMASJIDAN

Oleh : Juhari
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
juhari.hasan@ar-raniry.ac.id

ABSTRAKS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi, diskusi kelompok dan indepth interview. Fokus utamanya adalah keberadaan masjid sebagai sebuah bangunan suci umat Islam yang tidak saja dipergunakan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua sektor kehidupan. Idealnya, masjid merupakan titik kumpul dalam proses pemberdayaan masyarakat, namun, pasca runtuhnya kekhalifahan Islam hingga saat ini peran masjid lebih sering dipakai sebagai tempat beribadah semata. Sedangkan posisi masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan masyarakat mulai kurang menggembirakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya masjid memiliki potensi besar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Namun, potensi ini kurang terkelola dengan baik sehingga terkesan masjid tidak mampu memberdayakan jamaahnya. Dalam rangka memberdayakan masyarakat, terdapat 3 (tiga) dimensi strategis penting untuk dikembangkan, yaitu penguatan dimensi intelektualitas berbasis masjid; pemberdayaan dimensi spiritualitas; dan pengembangan dimensi kreativitas dan ketrampilan sosial.

ABSTRACT

This research uses a qualitative approach with observation techniques, documentation, group discussions and in-depth interviews. The focus of research is the existence of masjid as a building which is not only used for worship, but also for enhancing community capacity in all sectors of life. Ideally, the masjid is a gathering point to empowerment process in the community, however, after the collapse of the Islamic caliphate until now the role of the masjid is more often used as a place of worship only. Meanwhile, the position of the masjid as a center of civilization and community empowerment is starting to become less encouraging. The results of the study show that basically masjid have great potential for community development, such as the potential for human and economic resources. However, this potential is not well managed so that it seems that the masjid is not able to empower its congregation. In order to empower the community, there are 3 (three) important strategic dimensions to be developed, namely strengthening the mosque-based intellectual dimension; spiritual dimension empowerment; and the development of dimensions of creativity and social skills.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan sebuah institusi sosial keagamaan yang selalu dapat ditemui dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Islam. Masjid tidak saja berada di tengah mayoritas masyarakat Islam semata, akan tetapi ia juga dapat dijumpai dalam komunitas minoritas muslim di seluruh dunia. Bagi umat Islam, membangun masjid merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka beribadah, khususnya shalat. Shalat yang didirikan secara berjamaah memiliki kelebihan (fadhilat) tersendiri di dalam ajaran Islam berbanding shalat sendirian. Secara logika sederhana, setiap mendirikan shalat berjamaah maka akan membutuhkan tempat/ sarana yang memadai sehingga memungkinkan untuk beribadah secara *kehusnu'*. Dalam rangka itulah masyarakat Islam selalu berupaya membangun masjid sebagai tempat/sarana beribadah.

Pembangunan rumah ibadah tidak saja dilakukan oleh masyarakat Islam, akan tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat pemeluk agama lainnya, seperti gereja, kuil, pure, vihara dan lain-lain. Di Indonesia, pengaturan tentang pembangunan rumah ibadah dan pelaksanaan syiar agama oleh pemeluk agama yang bersangkutan telah diatur mekanismenya dalam aturan perundang-undangan, termasuk kebijakan dalam mendirikan rumah ibadah. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki keberagaman agama, etnik dan budaya, sehingga negara telah memberikan ruang publik bagi masing agama dan etnik tersebut untuk mengekspresikan semangatnya dalam menjalankan perintah agama.

Bagi masyarakat Islam, masjid tidak sekedar tempat shalat semata-mata, namun memiliki fungsi yang bersifat multi dimensional. Artinya, selain berfungsi sebagai pusat kerohanian khususnya shalat dan ibadah lainnya, masjid juga digunakan sebagai sentra-sentra kegiatan sosial, di antaranya masjid dijadikan sebagai sentral/ pusat pendidikan dan pelatihan, pusat ekonomi dan bisnis, pusat pembinaan administrasi dan kelembagaan serta berbagai pusat kreatifita sosial dan budaya lainnya. Di zaman Rasulullah, masjid benar-benar telah diwujudkan sebagai pusat pendidikan dan peradaban Islam sehingga lembaga ini telah dijadikan *role of models* (acuan/panutan) dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.¹

¹ Aziz Muslim, 2004, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, dalam Aplikasi : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, vol V nomor 2, Yogyakarta, hlm. 107.

Keberhasilan Rasulullah dan shahabatnya dalam membangun dan memberdayakan masyarakat/ umat Islam berbasis masjid inilah yang telah menyuntik spirit kerohanian masyarakat Islam pasca wafatnya Rasulullah sehingga masyarakat Islam mampu mengembangkan agama dan peradabannya mempengaruhi sistem sosial dari masa ke masa. Keberhasilan masyarakat Islam dalam melakukan pemberdayaan dan peradaban masyarakat itu tidak terlepas dari beberapa dimensi yang dikembangkan dalam institusi kemasjidan oleh Rasulullah dan khalifah-khalifah Islamiyah setelahnya. Karena itulah masjid memiliki kesamaan fisik, struktur, model, visi – misi dan program kerja dalam memberdayakan masyarakatnya di setiap ruang dan waktu. Berbagai kajian ilmiah telah dilakukan para ilmuwan terkait keberadaan masjid sebagai pusat pemberdayaan dan peradaban Islam sehingga telah mengelompokkan peran institusi masjid ini ke dalam tiga dimensi pemberdayaan utamanya, yaitu dimensi *Ri'ayat*, *Idarat* dan *imarat*.

Ketiga dimensi ini telah membentuk trisula kekuatan (*triangle power*) pemberdayaan masyarakat islam yang sangat strategis. Disebut strategis karena ketiga dimensi ini mampu menyentuh berbagai dimensi hidup manusia secara keseluruhan. Karena itulah masjid merupakan institusi sekaligus simbol pemersatu umat Islam sehingga melahirkan semangat *ukhuwah* (solidaritas sosial) yang mengikat. Namun, pasca keruntuhan kekhalifahan Islam di seluruh dunia, maka keberadaan masjid sebagai institusi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ikut mengalami kemunduran hingga saat ini. Meskipun secara fungsional institusi masjid ini masih mampu menggerakkan masyarakat untuk beribadah dan juga pengembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan, namun secara struktural, peran dan fungsi masjid belum terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang padu sehingga mampu menghubungkan satu masjid dengan masjid lainnya. Ketidakterpaduan ini ikut berpengaruh pada kekurangmampuan manajemen/ pengurus masjid dalam menggali potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Karena itu beberapa pertanyaan di bawah ini dinilai urgen untuk dijawab melalui aktivitas penelitian yang bersahaja, yaitu : (1) Bagaimana Potensi masjid dapat memberdayakan masyarakat ? dan (2) Bagaimanakah dimensi-dimensi strategis institusi masjid dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?

KAJIAN TEORITIK

1. Pengertian Masjid.

Secara harfiah, kata masjid berasal dari bahasa Arab yaitu dari *Sajada – Yasjudu* - *Sujudan* yang bermakna tempat sujud. Kata tempat menunjukkan suatu keadaan, lokasi, bangunan, ruangan atau suatu fasilitas tertentu yang digunakan untuk bersujud. Makna ini memberikan pemahaman bahwa secara fisik, masjid diartikan dengan bangunan atau ruangan yang secara fungsional digunakan sebagai sarana untuk bersujud, yaitu melaksanakan shalat. Pengertian lainnya disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 582 tahun 2017 bahwa masjid adalah bangunan atau rumah ibadah umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan shalat 5 waktu, shalat jum'at dan kegiatan hari besar Islam serta menjadi pusat dakwah umat Islam.

Secara terminologis M.Hasan Basry mengartikan masjid sebagai tempat bersujud kepada Allah swt dalam bentuk ibadah shalat. Secara fisik masjid merupakan bangunan *muharram* atau ruangan *muqaddas* yang dibangun secara bersahaja oleh umat Islam. Kedua kata ini mengandung makna, masjid adalah tempat suci yang digunakan untuk mensucikan diri. Namun masjid tidak sekedar tempat ibadah shalat semata-mata akan tetapi ia berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam yang mencakup pendidikan aqidah, syar'iyah, mu'amalah maupun pembinaan akhlakul karimah.² Penjelasan lain tentang makna masjid dijelaskan oleh Budiman Mustofa, bahwa masjid merupakan sarana/ media penyelenggaraan ibadah dalam rangka menunjukkan sikap dan perilaku kepatuhan dan ketaatan kepada Allah swt.³

Syeikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan menyebutkan bahwa masjid adalah sebuah tempat yang bebas dari hak kepemilikan seseorang yang dikhususkan untuk shalat dan beribadah.⁴ Menurut Budiman Mustofa, masjid adalah tempat suci umat

² M.Hasan Basry, 2008, *Managemen Masjid dan Meunasah*, Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (DKMA), Banda Aceh, hlm.16 – 17.

³ Budiman Mustofa, 2008, *Manajemen Masjid, Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*, Ziyad Books, Surakarta, hlm.20.

⁴ Syeikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan, 2018, *Fiqih Sekitar Masjid*, cet.III, Pustaka Imam as-Syafi'i, Jakarta Timur, hlm.9.

Islam yang difungsikan sebagai sarana untuk beribadah dan aktivitas lain yang berorientasi pada proses kepatuhan dan ketaatan manusia terhadap Tuhannya.⁵

Berpijak dari 3 (tiga) definisi di atas dapat dijelaskan bahwa Masjid merupakan tempat suci umat Islam yang dirancang sebagai tempat beribadah, seperti shalat dan aktivitas lain yang berkenaan dengan *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Pengertian ini menunjukkan bahwa masjid tidak saja dipergunakan sebagai tempat shalat, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan publik sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, politik, ekonomi dan pembinaan akhlakul karimah. Karena itu masjid dapat dikatakan sebagai *multipurpose building* dalam rangka penguatan kapasitas dan peradaban umat Islam. Inilah salah satu alasan Rasulullah menjadikan masjid sebagai *central of Islamic community Development*.

2. Hirarkhi Tipologis Masjid

Keberadaan masjid bagi umat Islam sudah ada sejak waktu yang cukup lama dan berperan sebagai pusat perkembangan peradaban Islam sehingga masjid juga telah mendapat perhatian para ilmuwan untuk melakukan kajian-kajian ilmiah terkait masjid. Studi klasik tentang masjid telah menempatkan institusi ini sebagai pusat perkembangan dan peradaban masyarakat Islam. Sebagai sebuah institusi keagamaan masjid belum secara tegas dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Namun seiring bertambah banyaknya umat Islam di seluruh kawasan, maka semakin banyak pula jumlah masjid yang berkembang secara signifikan, sehingga di Indonesia, institusi masjid ini telah dikelompokkan menjadi beberapa tipologis yang bersifat hirarkhis.

Pengelompokan masjid ke dalam beberapa tipologi tersebut telah memposisikan masjid-masjid di Indonesia ke dalam beberapa hirarkhi strukturalis. Pengelompokan ini didasarkan pada SK Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia nomor : Dj.II/ 802/ 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Paling tidak terdapat 2 (dua) hal yang diatur di dalam SK tersebut terkait keberadaan masjid di Indonesia, yaitu : *Pertama*, mengatur secara spesifik tentang manajemen masjid yang meliputi pembinaan dan pengelolaan masjid

⁵ Budiman Mustofa, 2008, *Manajemen Masjid, Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*, Ziyad Books, Surakarta, hlm.20.

dalam 3 (tiga) dimensi utama, yaitu : (1) dimensi *Idarah*, yang mengatur tentang manajemen/ tata kelola kemasjidan; (2) dimensi *Imarah* yang mengatur tentang upaya memakmurkan/ menghidupkan masjid; dan (3) dimensi *Ri'ayah*, yaitu dimensi pembangunan dan pemeliharaan fisik/ bangunan masjid.

Kedua, mengatur tentang tipologi masjid secara hirarkhi strukturalis sehingga keberadaan masjid telah tersusun dan terstruktur secara manajemen kemasjidan di seluruh Indonesia. Secara hirarkhi strukturalis, masjid-masjid yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kategori tipologi masjid yang secara struktural dibentuk sebagai berikut:

- a. Masjid Negara; Masjid ini berkedudukan di ibu kota negara (Jakarta) yaitu masjid Istiqlal.
- b. Masjid Nasional; yaitu masjid yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi dan di-SK-kan oleh Menteri Agama.
- c. Masjid Raya, berkedudukan di ibu Kota Provinsi yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur.
- d. Masjid Agung; berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/ Kota yang disahkan dengan SK Bupati/ walikota.
- e. Masjid Besar; berkedudukan di ibu kota Kecamatan yang disahkan dengan SK Camat.
- f. Masjid Jami'; berkedudukan di lingkungan komunitas (desa/ gampong)
- g. Masjid Bersejarah, dan
- h. Masjid yang berada di tempat umum/ publik.

Berpijak dari Keputusan diatas, M. Hasan Basry mengurutkan tipologi masjid ke dalam 5 jenis/ tingkatan, khususnya di Aceh yaitu :

- a. *Masjid Raya*, yaitu masjid yang berkedudukan di ibu kota provinsi Aceh (Banda Aceh) yang dikenal namanya dengan Masjid Raya Baiturrahman. Masjid raya ini berfungsi sebagai masjid *Pembina Utama* yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap semua masjid agung yang berada di setiap Kabupaten/ Kota di Aceh.
- b. *Masjid Agung*, Masjid ini berada di semua Kabupaten/ Kota di Aceh sehingga jumlahnya tidak berbeda dengan jumlah Kabupaten/ Kota yang ada. Untuk saat ini jumlah Kabupaten/ kota di Aceh sebanyak 23 Kabupaten/ Kota, sehingga

jumlah Masjid Agungpun sebanyak 23 masjid. Secara fungsional masjid ini berfungsi sebagai *Pembina* yang melakukan pembinaan terhadap masjid-masjid besar Besar yang ada di setiap Kecamatan secara sinergis dan berkesinambungan.

- c. *Masjid Besar*, Masjid Besar berada di ibu kota Kecamatan dan berfungsi sebagai *Pembina Madya*. Menurut data statistik, di Aceh terdapat sebanyak 289 Kecamatan sehingga jumlah masjid Besarpun dapat dipastikan sesuai dengan jumlah Kecamatan yang ada.
- d. *Masjid Jami'*, yaitu masjid yang berada di desa atau kemukiman yang semua Kecamatan dan berkedudukan di wilayah pemukiman penduduk. Masjid ini berfungsi sebagai *Penghubung* antara masjid dengan Meunasah dan mushalla yang ada di sekitarnya.
- e. Masjid Keluarga/ Kelompok, yaitu masjid milik sekelompok masyarakat atau keluarga yang dijadikan sebagai pusat ibadah (shalat), contohnya masjid Ali r.a, Masjid Siti Fathimah r.a dan beberapa masjid lainnya di Makkah dan Madinah.⁶

Ke delapan tipologi masjid ini memberikan makna bahwa pada masing-masing level struktur atau kedudukan diikuti oleh peran, kewenangan dan jangkauan kerja yang berbeda. Namun secara umum memiliki peran yang sama yaitu sebagai sarana utama untuk beribadah. Pembagian tipologi seara hirarkhis – strukturalis ini dipersepsikan mampu menggerakkan peran masjid secara maksimal dalam membina dan membangun kapasitas masyarakatnya, sehingga pembentukan tipologi hirarkhi strukturalis ini dipandang sebagai sebuah terobosan positif untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat Islam.

3. Konsep dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid

Kata pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti mampu atau kuat. Penambahan awalan pe - dan akhiran - an menunjukkan proses membangun kemampuan atau kekuatan sehingga terbebas dari kondisi yang tidak berdaya. Secara bahasa kata pemberdayaan masyarakat di Indonesia diambil dari bahasa Inggris,

⁶ M.Hasan Basry, 2008, *Management Masjid dan Meunasah*, Dewan Kemakmuran Masjid Aceh, Banda Aceh, hlm. 18 – 19.

yaitu *empowerment* yang sering diterjemahkan menjadi upaya mendapatkan kekuatan sehingga mampu berdiri sendiri. Menurut Widiastuti konsep ini mulai digunakan dalam masyarakat Eropa sekitar era tahun 1970-an dan hingga saat ini konsep pemberdayaan masyarakat ini terus bergulir hingga ke sejumlah kawasan termasuk di Indonesia.⁷

Edi Suharto menyebutkan, pemberdayaan adalah proses bersahaja yang dilakukan kelompok kuat terutama para penguasa dalam rangka membangun masyarakat yang lemah agar lebih berdaya, baik pemberdayaan ilmu dan ketrampilan, peningkatan kepercayaan diri yang kuat, Pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya/ agama lainnya.⁸ Sri Widiyanti menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian proses pembebasan masyarakat dari keterkungkungan dan kepasrahan pada nasib serta membebaskan mereka dari kekuasaan mutlak yang bersifat menekan menuju kehidupan yang stabil dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Ia menambahkan bahwa pemberdayaan bukanlah sebuah ilustrasi yang netral bagi mempertahankan kekuasaan, namun memiliki orientasi yang jelas untuk penguatan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Berpijak dari beberapa konsep pemberdayaan masyarakat di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan adalah usaha serius dan terencana untuk memberikan bantuan kepada orang lain agar mampu menggerakkan berbagai potensi yang dimilikinya agar dapat hidup secara layak dan mandiri. Jika dikaitkan dengan institusi masjid, maka istilah pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah pengerahan seluruh kemampuan dan aset yang dimiliki masjid untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kemakmuran jamaahnya. Jadi, masjid tidak hanya sebagai tempat shalat atau ibadah *mahdhah* lainnya, akan tetapi harus menjadi inisiator bagi proses pemberdayaan masyarakat.

Muhammad Jawahir menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak saja dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial, akan tetapi dapat juga

⁷ Widiastuti, dkk, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.12.

⁸ Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁹ Sri Widayanti, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, Welfare : Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol.1 nomor.1, edisi Januari – Juni, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.99.

dilakukan melalui lembaga kemasjidan, terutama dalam hal penguatan dimensi spiritualitas dan kemampuan finansial masyarakatnya, khususnya pemberdayaan ekonomi jamaah.¹⁰ Karena itu, kajian ini mencoba menempatkan 3 (tiga) dimensi penting dan strategis sebagai isu utama untuk dikembangkan manajemen masjid dalam rangka memberdayakan jamaah/ masyarakatnya, yaitu penguatan kapasitas keilmuan, peningkatan amal ibadah dan pemberdayaan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan studi dokumen dan *interview*. Pengamatan dilakukan terkait pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, seperti kekokohan bangunan, kenyamanan beribadah yang mencakup kebersihan, kerapian, keberadaan fasilitas media, tempat wudhu' toilet, kemakmuran jamaah, akses untuk para difabel dan lain-lain. Studi dokumentasi dilakukan terkait tata kelola ke-manajemen-an masjid, seperti pembukuan/ neraca keuangan, pengaturan imam, khatib (Jumat dan hari raya), muazzin, bilal dan lainnya. Untuk memperoleh data yang lebih mendalam maka dilakukan *in-depth interview* dengan sejumlah tokoh terkait pembangunan dan kemakmuran masjid, di antaranya Imam Masjid pada masing-masing level, Ketua dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid serta Panitia Pembangunan.

Proses pengumpulan data dilakukan di 10 Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan daerah. Kabupaten/ Kota yang dijadikan sumber pengumpulan data adalah : (1) Kota Banda Aceh, (2) Kabupaten Aceh Besar, (3) Kabupaten Pidie, (4) Kabupaten Aceh Utara, (5) Kabupaten Aceh Tamiang, (6) Kabupaten Aceh Tengah, (7) Kabupaten Aceh Tenggara, (8) Kota Subulussalam, (9) Kabupaten Aceh Selatan, dan (10) Kabupaten Nagan Raya. Pada setiap Kabupaten/ Kota, dipilih beberapa masjid sesuai hirarkhi tipologis yang diatur dalam SK Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia nomor : Dj.II/ 802/ 2014. Masjid yang dijadikan sampel pengumpulan

¹⁰ Muhammad Jawahir, dkk, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*, dalam Jurnal Spektra (sinta-3) vol. 1 nomor.1, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah, hlm. 40 -41.

informasi terdiri dari 10 Masjid Agung (Kabupaten/ Kota), 10 Masjid Besar (Kecamatan) dan 10 masjid Jami', sehingga total sampel mencapai 30 Masjid.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini dipaparkan sejumlah data terkait 2 (dua) cakupan utama kajian ini, yaitu potensi dan dimensi pemberdayaan masyarakat berbabis masjid, yaitu sebagai berikut :

1. Potensi Masjid sebagai pusat pemberdayaan Masyarakat.

Pada dasarnya, masjid memiliki potensi yang besar untuk melakukan pemberdayaan jamaah/ masyarakat. Pada zaman Rasulullah dahulu, masjid itu betul-betul berposisi sebagai pusat semua aktivitas keagamaan umat Islam sehingga menjadi pusat perhatian publik. Masjid tidak saja sebagai pusat ibadah, akan tetapi juga pusat pendidikan dan pelatihan, termasuk latihan militer, pusat pembahasan perekonomian, pusat peradaban dal lain-lain, sehingga masjid memiliki potensi besar dalam membangun dan memberdayakan masyarakat secara komprehensif.¹¹ Dr M Jamil Ibrahim menjelaskan bahwa sangat banyak potensi yang tersimpan di semua masjid. Bangunan masjid itu sendiri sudah dapat disebut sebagai sebuah potensi, karena dalam fisik bangunan inilah semua potensi lain dapat berkumpul, baik potensi sumber daya manusia seperti tokoh agama, tokoh penddikan, tokoh ekonomi dan lainnya yang senantiasa hadir ke masjid. Begitu juga dengana sumber daya alam yang dimiliki masjid, seperti lahan sawitm tanah sawah dan usaha produktif lainnya yang merupakan aset penting bagi pemberdayaan masyarakat. Kedua sumber daya ini akan mampu menghadirkan sumber daya pendudkung lainnya, seperti sumber daya ekonomi dan ketrampilan.¹²

Berbagai potensi yang dimiliki masjid menjadi modal utama dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Berpijak dari data yang didapatkan selama melakukan penelitian,

¹¹ Hasil Wawancara dengan Drs Ust Saifuddin A Rasyid, Imam besar Masjid Baitul Jannah Kemukiman Tungkob Kabupaten Aceh Besar, 11 Agustus 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Ust Dr H M Jamil Ibrahim, Imam Besar Masjid Oman Al-Makmur Lamprit, Kota Banda Aceh, 9 Agustus 2022.

maka potensi-potensi yang dimiliki institusi masjid ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) potensi utama, yaitu Potensi Sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.

a. Potensi Sumber daya Manusia.

Setiap masjid pasti memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan sebagai penggerak (dinamisator) pembangunan dan pemberdayaan manusia seutuhnya. Hanya saja sumber daya manusia yang dimiliki itu tidak sama antara satu masjid dengan masjid lainnya. Apalagi jika dibanding kualitas SDM yang tersedia di wilayah perkotaan dengan kualitas SDM yang tersedia di kawasan pedesaan dan di daerah pedalaman. Ketersediaan SDM di perkotaan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan di pedesaan.¹³

Berpijak dari data di atas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan imam di setiap masjid merupakan sebuah keniscayaan. Kemakmuran masjid dari semua lini tidak akan bisa dicapai tanpa adanya imam baik imam syik maupun imam *rawatib*. Selain ketersediaan imam yang memadai, pengaturan jadwal imampun sudah diatur sehingga setiap waktu pelaksanaan shalat selalu dipimpin oleh imam yang berbeda-beda. Keberadaan imam di kawasan perkotaan dan sekitarnya sudah tergolong memenuhi standar. Hampir semua imam di masjid-masjid perkotaan adalah qari, meskipun tidak semuanya hafidh 30 juz, seperti para imam di Kota Banda Aceh (seperti Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Oman al-Makmur, masjid Baitul Musyahadah, dan lain-lain), masjid Kota Jantho, Masjid Kota Sigli, Lhoksukon, Panton Labu, dan Tamiang. Demikian juga dengan imam masjid di kota Takengon (masjid Agung), Kuta Cane, Kota Subulussalam (As-Silmi dan Masjid Agung), Kota Tapak Tuan dan lain-lain.¹⁴

Terlepas dari adanya perbedaan kualitas para Imam, BKM dan panitia Pembangunan antara masjid di kawasan perkotaan dengan masjid di daerah pedesaan, namun tidak bisa dinafikan bahwa mereka semua

¹³ Wawancara dengan sejumlah Imam Masjid, pengurus BKM dan Panitia Pembangunan Masjid sepanjang proses pengumpulan data (Agustus s/d Nopember 2022)

¹⁴ Wawancara dengan sejumlah Imam Masjid, pengurus BKM dan Panitia Pembangunan Masjid sepanjang proses pengumpulan data (Agustus s/d Nopember 2022)

merupakan aset SDM potensial yang dimiliki masjid. Kekurangan yang dimiliki masing-masing masjid, terutama di kawasan pedesaan atau masjid pada level bawah menjadi tanggung jawab masjid yang berada satu peringkat di atasnya. Namun hal inilah yang belum terjadi dalam proses pemberdayaan SDM Masjid di seluruh Aceh. Artinya, secara struktural, keberadaan masjid sudah tersusun dalam bentuk hirarkhi strukturalis secara baik, bahkan sudah diatur dalam kebijakan pemerintah, namun secara fungsional organisatoris masjid yang berada di level atas belum menjalankan fungsi untuk memberdayakan masjid yang berada satu peringkat di bawahnya.

b. Potensi sumber daya ekonomi.

Selain potensi Sumber daya manusia, masjid juga memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Salah satu sumber ekonomi masjid diperoleh dari tabungan amal baik harian maupun mingguan. Dari sumber ini saja masjid bisa mendapatkan dana antara Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)/ minggu. Dana ini belum termasuk dari sumber lain, seperti zakat, infaq, sedekah, waqaf maupun event pernikahan yang bila dikumulatikan bisa mendatangkan sumber keuangan masjid yang memadai.¹⁵ Salah satu masjid yang sudah mengembangkan usaha ekonomi kemasjidan adalah *masjid Agung At-Taqwa Kuta Cane Aceh Tenggara*. Masjid ini di samping mendapatkan alokasi dana tetap dari pemerintah Kabupaten, juga memiliki unit usaha mandiri yang semua keuntungannya dikembalikan ke kas masjid. Di antara unit usaha yang dilakukannya adalah adanya penginapan/ hotel yang berada dipusat ibu kota Kuta Cane. Selain itu masjid ini juga memiliki usaha swalayan yang juga semua keuntungan yang diperoleh menjadi aset/ kekayaan dan kemakmuran masjid.¹⁶

Hal ini juga dikembangkan oleh *masjid Oman Al-Makmur Lamprit Kota Banda Aceh*. Awalnya masjid ini ditetapkan sebagai masjid Agung Kota Banda

¹⁵ Angka ini bersifat komulatif yang didasarkan pada studi dokumentasi 30 masjid yang dijadikan sampel pengumpulan data.

¹⁶ Wawancara dengan Ust. Zarkasyi, Imam Besar Masjid Agung At-Taqwa Kuta Cane, Bapak Alimuddin, Ka.UPTD/ ketua BKM dan beberapa pengurus Masjid Agung lainnya, 26 Nopember 2022.

Aceh, namun belakangan status ini dicabut atas permintaan masyarakat dan pengurus masjid. Meskipun pasca pencabutan status sebagai masjid Agung, Masjid ini telah mampu mengembangkan kepercayaan publik sehingga mendapat berbagai aset pemberdayaan ekonomi baik bersumber zakat, infaq dan sedekah. Bahkan saat ini telah memiliki aset dan potensi ekonomi produktif yang bersumber dari hotel yang hasil keuntungannya dipergunakan untuk memberdayakan jamaah kurang mampu.¹⁷

Ustad Mauliza Akbar menambahkan bahwa dalam rangka memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat *masjid Omam Al-Makmur* telah berinisiasi membuka layanan ATM beras bagi jamaah kurang mampu. Upaya ini ternyata cukup efektif untuk membangun komunikasi dan keterikatan batin sesama jamaah, khususnya antara jamaah yang memiliki kemampuan lebih dengan jamaah lain yang kurang mampu. Hubungan batin ini juga menjadi perekat dalam bermasyarakat dan penyemangat dalam beribadah.¹⁸

Selain kedua masjid di atas, *masjid As-Silmi* Kota Subulussalam juga memiliki program pemberdayaan masyarakat melalui program *Jumat berbagi* berupa pemberian santunan kepada kaum dhu'afa setiap bulan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu)/ orang yang diberikan kepada 4 (empat) orang.¹⁹ Jumlah santunan ini memang belum maksimal untuk memberdayakan masyarakat miskin, akan tetapi semangat memberi yang diperlihatkan pengurus masjid ini patut diapresiasi sebagai langkah awal upaya pemberdayaan masyarakat melalui masjid.

Potensi ekonomi lainnya yang dimiliki masjid adalah adanya sumbangan rutin dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan melalui masjid. Namun tidak semua masjid

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ust Dr H M Jamil Ibrahim, Imam Besar Masjid Oman Al-Makmur Lamprit, Kota Banda Aceh, 9 Agustus 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Ustaz Mauliza Akbar, Ketua Bidang Imarah, Masjid Oman Al-Makmur Lamprit Kota Banda Aceh.

¹⁹ Hasil diskusi kelompok dengan Pengurus Masjid As-Silmi tanggal 28 September 2022. Ikut hadir dalam diskusi kelompok ini Ust Ismail (imam chik), H Samsir (imam rawatib), Ust Muzakkir (Bendahara dan Ust Anshari (Ketua BKM).

mendapatkan alokasi dana itu untuk memakmurkan masjid dan jamaahnya. Dari data yang terkumpul dapat dikemukakan bahwa alokasi dana yang bersumber dari pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota) hanya dialokasikan untuk masjid Agung saja, selebihnya mengaku tidak mendapatkan banyuan tersebut. Meskipun demikian, mereka mengakui pernah mendapatkan kucuran dana aspirasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari sejumlah masjid yang dijadikan sampel penelitian dapat dikemukakan bahwa potensi sumber ekonomi masjid masih belum menggembirakan sehingga banyak masjid di Aceh yang masih sering meminta. Bahkan sebagian besar masjid yang dikunjungi menyampaikan permohonan bantuan kepada peneliti agar mendapatkan bantuan keuangan, atau ingin memanfaatkan peneliti menjadi mediator untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.²⁰ Hanya sebagian kecil saja yang sudah mampu memberi dalam rangka memberdayakan masyarakat, seperti Masjid Oman Lamprit Kota Banda Aceh, Masjid As- Silmi Kota Subulussalam.

Selain bantuan yang diterima dari berbagai sumber, rata-rata masjid di Aceh telah memiliki sumber perekonomian yang bersifat tidak bergerak, seperti tanah sawah, kebun yang rata-rata berawal dari waqaf masyarakat, toko dan lain-lain. Hal ini terungkap dalam diskusi kelompok bersama sebagian besar pengurus masjid selama proses pengumpulan data dilakukan.

Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi merupakan dua potensi besar yang menjadi peluang pemberdayaan masyarakat. Namun sekuat apapun sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang dimiliki, jika tidak dikelola dengan baik maka potensi-potensi tersebut tidak bisa dijadikan modal dalam proses pemberdayaan masyarakat.

2. Analisis Dimensi strategis institusi masjid dalam Pemberdayaan masyarakat.

²⁰ Fenomena ini terungkap saat melakukan wawancara dan proses observasi terhadap unit-unit pembangunan tertentu yang sedang dalam proses pengerjaan.

Dalam rangka menghadapi tantangan global dan krisis multidimensional yang dihadapi masyarakat Islam – khususnya di Aceh – maka institusi masjid perlu membenah diri sehingga keberadaan masjid tetap eksist di dalam masyarakat. Dalam sejarah sosial, gereja pernah ditinggalkan oleh penganut agama Kristen karena manajemen gereja dinilai tidak mampu berkontribusi dalam menjawab persoalan kemasyarakatan. Pengalaman serupa bisa saja menimpa umat Islam manakala manajemen masjid tidak mampu merespons berbagai isu kontemporer yang dapat memisahkan masjid dengan jamaahnya. Karena itu terdapat 3 (tiga) dimensi penting sebagai tawaran solusi alternatif bagi pemberdayaan masyarakat melalui institusi masjid. Ketiga dimensi itu adalah penguatan kapasitas keilmuan (dimensi rasional), penguatan aqidan dan peningkatan amal ibadah (dimensi spiritual) dan pemberdayaan ekonomi (dimensi sosial)

a. Dimensi Keilmuan dan pencerahan.

Dimensi keilmuan merupakan salah satu target dan orientasi yang sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka membangkitkan pemberdayaan masyarakat melalui masjid. Pemberdayaan dimensi pengetahuan ini akan memicu timbulnya berbagai inovasi dan pencerahan pemikiran dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna. Untuk mengembangkan dimensi keilmuan ini, maka masjid dapat menyediakan fasilitas pendukung sebagai sarana untuk mengasah kemampuan jamaah dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dalam banyak sumber ajaran Islam disebutkan bahwa ilmu pengetahuan menjadi kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang peradaban tinggi. Sebab, bagaimanapun juga di sepanjang sejarah kehidupan manusia, keberadaan ilmu pengetahuan menjadi kunci kesuksesan suatu bangsa. Kunci kemajuan peradaban Islam di masa lalu terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu pula dengan capaian kemodernan masyarakat Barat saat ini yang dimodali oleh pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika sedikit menelisik ke belakang, bahwa kemajuan yang dicapai umat Islam dahulu tidak terlepas dari peran masjid yang sangat besar. Masjid tidak saja berposisi sebagai rumah ibadah, akan tetapi menjadi pusat-pusat studi keilmuan yang intensif. Hampir sepanjang abad pertengahan, Islam mengembangkan ilmu

pengetahuan yang empiris dan rasionalis sehingga bermunculan teori-teori baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fiqh, teologi, filsafat, sains dan lain-lain. Setiap perkembangan yang capai selalu bermula dari masjid. Begitu juga dengan kemunduran demi kemunduran yang dirasakan umat Islam terutama pasca kebangkitan peradaban barat diawali dari menjauhnya masyarakat Islam dari masjid.

Dengan memperhatikan berbagai aktivitas di masjid selama proses pengumpulan data dilakukan, terkesan bahwa pertumbuhan masjid di Aceh sudah sangat menggembirakan. Menurut data dari Sistem Informasi Masjid Aceh (Siamasa) hingga tahun 2022 jumlah masjid di Aceh mencapai 4.383 masjid dengan berbagai tipologinya. Namun jumlah ini belum berbanding lurus dengan jumlah jamaah dan aktivitas kajian keislaman yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Intensitas pengajian dalam berbagai dimensi ilmu pengetahuan masih belum berjalan maksimal. Kajian-kajian keislaman masih bersifat sektoral seperti kajian tauhid, fiqh ibadah, tafsir, hadits dan tasawuf. Sedangkan studi keislaman yang bersifat universal, seperti kajian ekonomi, politik, pendidikan dan tantangan global masih belum banyak dibicarakan secara serius.

Pemahaman-pemahaman keislaman yang belum bersifat multidimensional ini telah menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dan bahkan konflik antar kelompok agama juga terjadi di beberapa masjid. Ironisnya, masjid Raya Baiturrahman yang idealnya menjadi institusi pemersatu dan role model bagi pemberdayaan keilmuan dan peradaban umat Islam, justru sempat memperlihatkan konflik interest yang kurang menggembirakan masyarakat. Sekiranya fenomena ini terus berkembang, maka agak sulit menempatkan masjid sebagai institusi strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat.

b. Dimensi Spiritualitas.

Dimensi spiritual merupakan elemen pembeda antara manusia dengan binatang. Melalui dimensi ini manusia akan lebih mengenal dan lebih dekat dengan Tuhanya melalui ritual peribadatan. Mempercayai Tuhan merupakan salah satu elemen ruhiyah yang dimiliki setiap manusia. Malinowsky menyebutkan bahwa tidak ada manusia seprimitif apapun hidupnya yang tidak berhajat kepada

Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan telah membentuk perilaku hidup yang menurut kepada aturan norma yang diatur oleh Tuhan melalui ajaran agama. Dalam Islam ajaran semacam ini disebut dengan ajaran syar'i yang bersumber dari wahyu.

Interaksi manusia dengan Tuhan berupa peribadatan sering dilakukan melalui media khusus yang disebut masjid. Masjid merupakan institusi keagamaan yang secara spiritual menjadi titik kumpul sesama manusia untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhannya. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas hubungan manusia dengan Allah ikut ditentukan oleh seberapa sering manusia itu mendatangi masjid. Kondisi menggambarkan bahwa lembaga masjid merupakan salah satu institusi strategis untuk mendidik dan memberdayakan suasana batin masyarakat yang bersifat spiritual. Menyadari kondisi ini, maka semua pengurus masjid yang ada di Aceh – khususnya masjid yang disasar melalui penelitian ini – telah melakukan sejumlah aktivitas kerohanian yang dapat membangkitkan semangat spiritualitas dan motivasi beribadah melalui kegiatan pengajian.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa aktivitas pengajian dan pendalaman keislaman telah dilakukan di berbagai masjid di Aceh meskipun dalam intensitas dan kualitas yang beragam. Kajian tersebut meliputi materi tentang ilmu tauhid, fiqh, sirah nabawiyah, kajian hadits, tafsir dan tasawuf. Namun demikian harus diakui bahwa aktivitas kajian keislaman tersebut lebih intens dilakukan di wilayah perkotaan, khususnya di ibu kota Propinsi dan Kabupaten/ kota. Sedangkan kegiatan pengajian di masjid-masjid pedesaan cenderung lebih jarang. Minimnya kajian keislaman dalam rangka meningkatkan/ pemberdayaan kapasitas keagamaan masyarakat pedesaan dikarenakan alasan klasik, yaitu *hana peng* (ketidakadaan dana).

c. Dimensi Kreativitas dan Ketrampilan.

Untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan ilmu pengetahuan maupun spiritualitas maka sudah saatnya masjid yang ada di Aceh untuk merubah mainset berfikirnya ke arah yang lebih maju dan modern. Selama ini masjid lebih sering menampilkan identitasnya sebagai institusi

peminta daripada pemberi. Istilah peminta identik dengan ketidakberdayaan, sedangkan pemberi identik dengan keberdayaan. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya para pencari derma untuk pembangunan masjid dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun sangat jarang dijumpai adanya masjid yang memiliki semangat dan orientasi filantropis dalam menjalankan programnya, sehingga masjid mampu memberikan layanan sosial kepada jamaahnya, baik layanan sosial keagamaan, sosial ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa masjid hanya berfungsi menjalankan rutinitas peribadatan semata, khususnya pelaksanaan ibadah shalat, itupun dengan jumlah jamaah yang belum berbanding lurus antara jumlah penduduk dengan jumlah jamaah di masjid. Para pengurus masjid di Aceh agaknya belum berani melakukan perubahan-perubahan mendasar yang bersifat revolutif dan radikal, terutama dalam hal menempatkan masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan masyarakat, seperti menempatkan masjid sebagai pusat peribadatan, pusat pendidikan dan pelatihan (diklat) keagamaan, pusat ekonomi dan bisnis, pusat studi antar budaya serta pusat-pusat studi strategis lainnya.

Dalam rangka mengembangkan kemandirian ekonomi masjid, idealnya para pengurus masjid di semua tingkatan yang ada mampu mengembangkan ide kreatif sehingga masjid menjadi pusat pemberdayaan jamaahnya. Di antaranya, masjid dapat berupaya mendatangkan dana yang besar yang berasal dari berbagai bersumber yang halal. Kemampuan ekonomi yang mandiri dan kualitas sumber daya manusia yang kuat merupakan dua kunci utama kesuksesan pemberdayaan masyarakat ke depan.

KESIMPULAN

Berpijak dari data dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Masjid baik yang ada di Aceh maupun di tempat lain, memiliki potensi besar untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi. Hanya saja potensi ini belum digerakkan secara maksimal sehingga proses pemberdayaan masyarakat berbasis masjid di

Aceh belum bisa berjalan secara ideal. Kekurangidealan ini terlihat dari belum tersedianya sumberdaya manusia yang handal sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga belum terciptanya kemandirian ekonomi masjid yang memadai. Di sisi lain pembangunan fisik masjid juga belum responsif gender, belum ramah difabel dan belum ramah lingkungan. Di zaman modern ini, masjid idealnya dapat berposisi sebagai titik kumpul untuk berbagai kepentingan masyarakat, seperti kepentingan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, ibadah, olah raga, kesehatan, ekonomi dan bisnis dan lainnya.

2. Dalam rangka melakukan proses pemberdayaan masyarakat, terdapat 3 (tiga) dimensi strategis yang layak dikembangkan, antara lain : (1) penguatan dimensi intelektualitas, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ilmunan yang berfariasi melalui masjid; (2) pemberdayaan dimensi spiritualitas, yaitu melahirkan generasi yang beriman dan taan dalam beribadah; dan (3) pengembangan dimensi kreativitas dan ketrampilan sosial. Kajian ilmu pengetahuan yang didasarkan pada aspek kemurnian akidah dan disertai oleh spiritualitas yang tinggi akan melahirkan generasi yang terampil dalam berbagai bidang keilmuan dan ketrampilan. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui lembaga masjid cenderung lebih bernilai positif berbanding kemajuan pengetahuan yang dicapai melalui lembaga-lembaga sekuler lainnya. *Wallahu A'lam...*

DAFTAR BACAAN

- Abdullah bin Shalih al-Fauzan, 2018, *Fiqh sekitar Masjid*, cet.III, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta.
- Andi Muh. Asrul Irawan, dkk, 2023, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bina Keluarga Bebas Stunting di Kecamatan Tanah Sareal Bogor*, Dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Universitas Al-azhar, Indonesia, Jakarta.
- Aziz Muslim, 2004, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, dalam *Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, vol V nomor 2, Yogyakarta.
- Budiman Mustofa, 2008, *Manajemen Masjid : Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*, Ziyad book, Surakarta.

- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Adhitama, Bandung.
- Hamdi Abdul Karim, 2020, *Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Peran dan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Keislaman*, dalam *Jurnal Islamic Education Management (ISEMA)*, vol.5 nomor.2, IAIN Metro Lampung.
- M. Hasan Basry, 2008, *Manajemen Masjid dan Meunasah*, PP Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (PP-DKMA), Banda Aceh.
- Muhammad Jawahir, dkk, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*, dalam *Jurnal Spektra*, Vol.1 nomor.1 Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah.
- Sri Widayanti, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan Teoritis*, Walfare : Jurnal Kesejahteraan Sosial vol.1 nomor.1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Widiastuti, dkk, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.